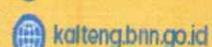
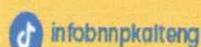
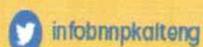
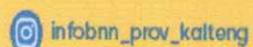




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) BNNP KALIMANTAN TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai target waktu yang ditentukan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan kinerja yang berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) pada tahun anggaran 2022 telah melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang P4GN berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BNNP Kalteng tahun 2020-2024 sebagai pedoman untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program P4GN.

Laporan ini menyajikan capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan BNNP Kalteng selama satu tahun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam menyelenggarakan tugas P4GN di daerah. Pelaporan ini dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang mengatur, bahwa penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja BNNP Kalteng dalam tahun 2022 yang meliputi kinerja Bidang di lingkungan BNNP Kalimantan Tengah dengan **11 Sasaran Kegiatan dan 17 Indikator Kinerja**. Pengukuran capaian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh bidang, secara umum berbagai target dapat berhasil dicapai dengan cukup baik. Untuk pelaporan realisasi BNNP Kalimantan Tengah telah melakukan input data ke dalam aplikasi pelaporan realisasi kegiatan dan anggaran dengan laman monevgar.bnn.go.id. Laporan ini dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Akhirnya, kami berharap agar Laporan Kinerja BNNP Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan media evaluasi untuk menilai kinerja BNNP Kalimantan Tengah secara keseluruhan. Demikian semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha kita semua. Amin.

Palangka Raya, Januari 2023

Kepala BNNP Kalimantan Tengah,



Drs. Sumirat Dwiyanto, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menetapkan kelembagaan Badan Narkotika Nasional, sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya struktur organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi diatur melalui Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

Selanjutnya dalam kelembagaan BNN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019, dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Untuk implementasi Program P4GN, telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BNNP Kalteng Tahun 2020-2024.

Sasaran ini terbagi dalam **11 (sebelas) sasaran kegiatan** dan terdiri dari **17 (tujuh belas) Indikator Kinerja**.

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja yaitu meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan indikator kinerja jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "tinggi" di wilayah provinsi sebanyak **2 kabupaten**; meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori "tinggi" di wilayah provinsi sebanyak **2 kabupaten**; meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN dengan indikator kinerja jumlah kabupaten/kota dengan indeks kemandirian partisipasi berkategori "mandiri" di wilayah provinsi sebanyak **2 kabupaten** dan meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan dengan dua indikator kinerja yakni jumlah kawasan di wilayah provinsi yang beralih status dari "bahaya" menjadi waspada sebanyak **1 kawasan** dan nilai keterpulihan kawasan rawan yang diintervensi sebesar **2,95**.

Bidang Rehabilitasi memiliki 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja yaitu meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi dengan dua indikator

kinerja yakni jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih sebanyak **15 orang** dan jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis sebanyak **10 orang**; meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika dengan dua indikator kinerja yakni jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi sebanyak **2 lembaga** dan indikator kinerja jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi sebanyak **4 unit**; dan meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi dengan indikator kinerja indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Tengah **3,624**.

Bidang Pemberantasan memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya dengan indikator kinerja jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 sebesar **23 berkas** dan meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika dengan indikator kinerja nilai tingkat keamanan, ketertiban sebesar **100** indeks dan kesehatan tahanan dan nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika sebesar **100** indeks.

Bagian Umum selaku penanggungjawab manajemen organisasi memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu : meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien dengan dua indikator kinerja yakni nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Kalimantan Tengah sebesar **87,63** dan indikator kinerja jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan **Nilai Kinerja Anggaran mencapai target tidak ada**; meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur dengan dua indikator kinerja yakni nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Tengah sebesar **98,17** dan indikator kinerja jumlah **BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target tidak ada**.

Pada Tahun 2021 BNNP Kalimantan Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 12 sasaran kegiatan, dengan indikator kinerja kegiatan sebanyak 18 indikator sedangkan pada tahun 2022 BNNP Kalimantan Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebanyak 11 sasaran kegiatan dengan indikator kinerja kegiatan sebanyak 17 indikator.

Capaian target tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. 7 indikator kinerja melebihi target yang ditetapkan;
2. 6 indikator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan;
3. 5 indikator kinerja yang tidak mencapai target yang ditetapkan.

Capaian target tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. 4 indikator kinerja melebihi target yang ditetapkan;
2. 10 indikator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan;
3. 3 indikator kinerja yang tidak mencapai target yang ditetapkan.

Dari perbandingan di atas diketahui bahwa terdapat perbaikan dari kinerja tahun sebelumnya, namun juga terdapat indikator yang sebelumnya melebihi target menjadi sesuai dengan target.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menetapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Oleh karena itu, BNN sebagai lembaga pemerintah berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Presiden sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Organisasi Instansi Vertikal, BNN mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam wilayah provinsi, kabupaten dan kota. Tujuan tersebut harus dilaksanakan seimbang dengan satuan-satuan kerja yang ada dalam organisasi Badan Narkotika Nasional dengan sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi komponen rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja. Dengan terbentuknya satuan kerja vertikal di daerah, diperlukan sistem pengukuran kerja yang seragam, tepat, akurat dan informatif terkait kinerja antara Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota sebagai alat kontrol pengawasan dan pengukuran kinerja.

Penyusunan LKIP berpedoman pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi komponen rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja. LKIP dapat terwujud dengan baik diperlukan adanya keterpaduan sistem antar unit pelaksana tugas di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNN Kab./Kota). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNNP Kalimantan Tengah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah:

- a. Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BNNP Kalimantan Tengah;
- b. Sebagai ukuran tingkat keberhasilan/ kegagalan satuan unit kerja/ satuan kerja dalam mengemban tugas, wewenang, dan tanggung jawab;

- c. Sebagai alat untuk mengetahui dan memperbaiki/ menyempurnakan kelemahan/ kekurangan dalam pencapaian sasaran unit kerja/satuan kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- d. Sebagai sarana pemantauan dan peringatan dini terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi unit kerja/satuan kerja;
- e. Sebagai alat pembanding antara hasil yang dapat dicapai dan yang harus dicapai;
- f. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan/ penataan organisasi, kepegawaian, dan ketatalaksanaan, serta pengendalian sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

D. Ruang Lingkup

LKIP BNNP Kalimantan Tengah disusun berdasarkan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan oleh Kepala BNN RI atas pelaksanaan program P4GN di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Kepala BNNP yang bertanggung jawab atas kinerja BNNK/ Kota dibawahnya.

E. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan.

1. Kedudukan.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah BNN dan bertanggungjawab kepada Kepala BNN dan dipimpin oleh seorang Kepala BNNP.

2. Tugas.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kalimantan Tengah. Tugas Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 meliputi :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana dimaksud, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

3. Fungsi.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;

- c. pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;
- d. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- f. pelayanan administrasi BNNP; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

4. Kewenangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020, Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan Badan Narkotika Nasional yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah saat ini memiliki Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang sudah vertikal sebanyak 2 Kabupaten /Kota, yakni :

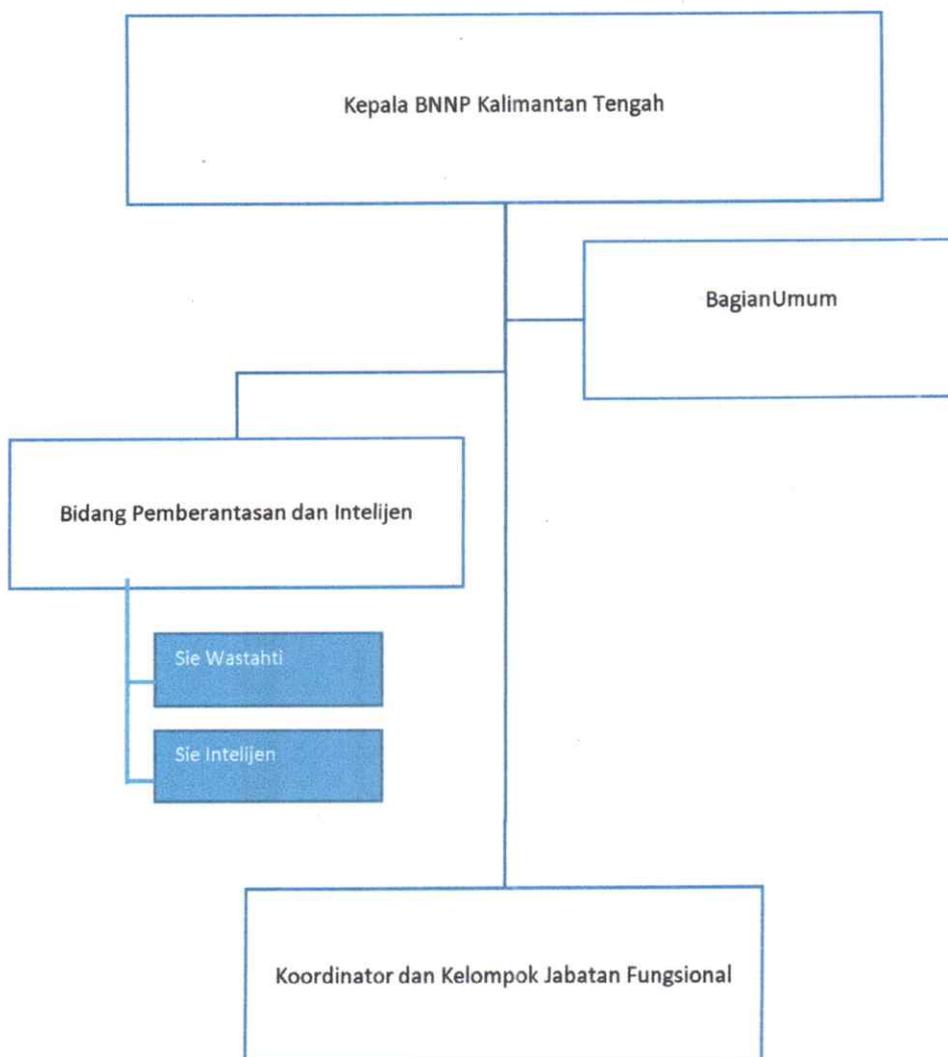
- 1) BNNK Palangka Raya
- 2) BNNK Kotawaringin Barat

Saat ini, masih terdapat 12 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang belum memiliki BNNK.

F. Struktur Organisasi.

Merujuk pada Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota maka struktur organisasi BNNP Kalimantan Tengah TA.2022 adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi BNNP Kalimantan Tengah TA 2022



Jumlah pegawai BNNP Kalimantan Tengah dan jajaran saat ini 120 orang dengan rincian sebagai berikut :

NO.	SATKER	PNS	POLRI	PPNP	TOTAL
1.	BNNP Kalimantan Tengah	38	11	20	69
2.	BNNK Palangka Raya	11	3	14	28
3.	BNNK Kotawaringin Barat	8	3	12	23
	TOTAL	57	17	46	120

Sesuai DSP, kebutuhan pegawai untuk BNNP sebanyak 153 orang, namun saat ini yang terpenuhi baru sejumlah 69 orang, sehingga baru 45,09% yang terpenuhi dari keseluruhan yang dibutuhkan. Sedangkan kebutuhan pegawai untuk BNNK sesuai DSP

sebanyak 74 orang, sehingga pada saat ini kebutuhan pegawai di BNNK Palangka Raya baru terpenuhi 37,83% dan BNNK Kotawaringin Barat baru terpenuhi 31,08%.

G. Sistematika.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidang P4GN ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan.

Bab II Perencanaan Kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Bab IV Penutup.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian/ lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Penyusunan Renstra dilaksanakan melalui pendekatan proses teknokratik, politik, partisipatif, top down, dan bottom up, dengan pendekatan substansial yang holistik, integratif, tematik, dan spasial (HITS). Dokumen Renstra menjadi dasar bagi gerak strategis dan operasional BNN sebagai LPNK dalam menangani isu nasional dan sekaligus mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam penanganan dan penanggulangan permasalahan narkoba.

Dalam penyusunan visi dan misi Tahun 2020-2024, BNN berpedoman atau mengacu pada visi dan misi presiden terpilih periode 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”.

Kepala BNN telah menetapkan visi BNN, yaitu: “Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Dalam rangka pencapaian visi, BNN juga memperbaharui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik. Misi BNN yaitu:

1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika secara Profesional;
2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika;
3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan.

Perjanjian Kinerja menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi

sasaran kinerja pegawai. Oleh karenanya, PK dapat menjadi instrumen dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,

B. Perjanjian Kinerja BNNP Kalimantan Tengah Tahun 2022

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian Kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Perjanjian Kinerja dapat menjadi instrument dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

1. Variabel

Variabel PK Satuan Kerja Vertikal terdiri atas sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target kinerja.

- a. **Sasaran kegiatan** satuan kerja vertikal diadopsi dari sasaran program unit organisasi eselon I yang memiliki fungsi di wilayah karena satuan kerja vertikal merupakan miniatur program dalam lingkup lokal.
- b. **Indikator kinerja kegiatan** adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan. Sebagaimana sasaran kegiatan satuan kerja vertikal, indikator kinerja kegiatan satuan kerja vertikal juga diadopsi dari indikator kinerja program unit organisasi eselon I. Pada level bidang di BNNP dan BNNK/Kota, indikator kinerja kegiatan merupakan turunan (derivatif) dari indikator kinerja Unit Kerja Eselon II di pusat yang relevan dengan bidang kerja masing-masing.
- c. **Target kinerja** menunjukkan tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran kegiatan. Target kinerja BNNP merupakan turunan (derivatif) dari target kinerja Unit Organisasi Eselon I, sedangkan target kinerja BNNK/Kota merupakan turunan (derivatif) dari target kinerja BNNP. Target kinerja menunjukkan tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran kegiatan. Target kinerja satuan kerja vertikal menggambarkan pencapaian kinerja di lingkup wilayah pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Pada level bidang di BNNP dan BNNK/Kota, target kinerja merupakan turunan (derivatif) dari target kinerja pada Unit Kerja Eselon II di pusat yang relevan dengan bidang kerja masing-masing.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BNNP KALIMANTAN TENGAH

A. Capaian Kinerja Organisasi

Penetapan Kinerja BNNP Kalteng tahun 2022 menetapkan 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebanyak 17 (tujuh belas) indikator. Di samping itu BNNP Kalteng juga melakukan berbagai kegiatan pendukung dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian sasaran kegiatan tahun 2022, serta penjelasan hasil capaian 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja, yang diuraikan sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2 Kabupaten/ Kota	2 Kabupaten/ Kota	100
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan	2 Kabupaten/ Kota	2 Kabupaten/ Kota	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase
1	2	3	4	5	6
	dan peredaran gelap narkoba	Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi			
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	2 Kabupaten/Kota	2 Kabupaten/Kota	100
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan	1 Kawasan	100
	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,85	2,97	104,21
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara	15 Orang	15 Orang	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase
1	2	3	4	5	6
		layanan IBM yang terlatih			
	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 Orang	10 Orang	100
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	2 Lembaga	2 Lembaga	100
	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	3 Unit	4 Unit	133,33
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Tengah	3,4	3,624	106
8	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika	10 Berkas	23 Berkas	230

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase
1	2	3	4	5	6
	lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	dan prekursor narkotika yang P-21			
9	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100
	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	100	100
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Tengah	88	87.63	99,57
	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	2 BNN Kabupaten/ Kota	0 BNN Kabupaten/ Kota	0
11	Meningkatnya tata kelola administrasi	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan	95	98,17	103,33

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase
1	2	3	4	5	6
	keuangan yang sesuai prosedur	Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Tengah			
	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	2 BNN Kabupaten/ Kota	0 BNN Kabupaten/ Kota	0

Untuk mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNNP Kalteng selama kurun waktu tahun 2022, dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Capaian kinerja tahun 2022 memiliki 1 indikator kinerja yang berbeda dengan indikator kinerja tahun 2021, dan beberapa yang berbeda dengan tahun 2020.

B. Evaluasi dan pengukuran capaian kinerja

Untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan capaian kinerja BNNP Kalteng Tahun 2022, diuraikan evaluasi dan analisa capaian kinerja sasaran dan indikator kinerja sesuai bidang tugas program P4GN dengan uraian sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatkan Daya Tangkal Anak dan Remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Dalam upaya menanggulangi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, BNN sebagai *focal point* penanggulangan narkoba telah melaksanakan Program Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba secara massive. Adapun target yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah upaya penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika dari 1,86 (2020) menjadi 1,69 (2024) atau sebesar 0,034% setiap tahun.

Untuk mencapai sasaran di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	PERSENTASE
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	2 Kab/ Kota	2 Kab/ Kota	100%

1. Definisi Operasional

Definisi Operasional Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori Tinggi di wilayah provinsi adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, meghindar dari dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba.

2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran menggunakan instrumen ukur ketahanan diri (Anti Drug Scale) yang mencakup 3 dimensi yaitu *Self Regulation* yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri. Dimensi *Assertiveness* yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas. Dimensi *Reaching Out* yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

Pengukuran Indeks Ketahanan diri remaja diukur menggunakan Aplikasi

Dektari Aja untuk tahun 2020-2024. Survey ini dilaksanakan pada saat melaksanakan kegiatan penyuluhan tatap muka baik DIPA maupun Non DIPA melalui input online. Hasil pengisian kuesioner nantinya akan dijadikan dasar perhitungan indeks ketahanan diri Remaja.

3. Hasil pengukuran

Hingga triwulan IV untuk seluruh satker di BNNP Kalteng mencapai 100% dengan 2 BNNK Kab/Kota tercapai targetnya berkategori nilai Tinggi, dengan rincian target capaian sebagai berikut.

NO.	SATKER	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	KATEGORI
1	BNNP Kalimantan Tengah	52	55,24	Sangat Tinggi
2	BNNK Palangka Raya	52	53,23	Tinggi
3	BNNK Kotawaringin Barat	52	57,15	Sangat Tinggi
DEKTARI PROVINSI KALTENG			55,21	Sangat Tinggi

Indikator kinerja Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah untuk capaiannya meningkat dibanding dengan tahun 2021. Dimana pada Tahun 2022 terdapat 2 dari 2 Kabupaten/Kota yang mencapai target (100%), sedangkan Tahun 2021 hanya 1 dari 2 kab/kota yang mencapai target (50%). Bahkan Provinsi Kalteng mendapatkan nilai Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba tertinggi kedua secara nasional.

4. Perbandingan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir

Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir:

Satker	2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
BNNP Kalimantan Tengah	-	-	51	49,51	52	55,24
BNNK Palangka Raya	-	-	51	49,12	52	53,23
BNNK Kotawaringin Barat	-	-	51	55,51	52	57,15

Pada tahun 2020, kegiatan Informasi dan Edukasi memiliki indikator kinerja yang berbeda dengan tahun 2021 dan 2022 yakni persentase masyarakat yang terpapar informasi P4GN Narkoba. Perbedaan indikator ini mengakibatkan capaian kinerja 2020 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dan 2022.

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2020	-	-	-
2021	2 kab/ kota	1 kab/ kota	50 %
2022	2 kab/ kota	2 kab/ kota	100 %

Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021, secara persentase, maka capaian kinerja BNNP Kalimantan Tengah meningkat dari 50% menjadi sebesar 100 %. Semua BNNK berhasil mencapai target pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan pada tahun ini petugas BNNP melakukan beberapa upaya, yakni melakukan pendampingan kepada peserta dalam pengisian kuesioner sehingga kuesioner diisi sesuai tata cara yang berlaku dan memastikan peserta mengisi kuesioner di tempat dengan sinyal yang memadai sehingga proses pengisian berjalan lancar.

5. Permasalahan/Hambatan yang dihadapi

Satker tidak bisa mengontrol pengisian Kuesioner Dektari oleh peserta, dikarenakan kegiatan penyuluhan ada yang dilakukan dengan metode virtual.

6. Faktor yang menunjang

Pemahaman anak dan remaja dalam kegiatan penyuluhan.

7. Sebagai Rekomendasi Perbaikan ke depan

a. Meningkatkan informasi dan edukasi kepada sasaran anak dan remaja dalam rangka meningkatkan daya tangkal terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

b. Melakukan koordinasi intensif dengan Pembina Fungsi PIC wilayah terkait survey Ketahanan Diri Remaja Tahun 2023.

8. Upaya yang Telah Dilakukan

- a. Melakukan pendampingan kepada peserta dalam pengisian kuesioner sehingga kuesioner diisi sesuai tata cara yang berlaku.
- b. Memastikan peserta mengisi kuesioner di tempat dengan sinyal yang memadai sehingga proses pengisian berjalan lancar.



Kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkoba di MTSn Nurul Yaqin Kuala Kurun Kab. Gunung Mas oleh Kepala BNNP Kalimantan Tengah

2. Sasaran : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Untuk mencapai sasaran diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase
2	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori Tinggi di wilayah provinsi.	2 Kabupaten/ Kota	2 Kabupaten/ Kota	100%

1. Definisi Operasional

Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan

anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal.

2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran di 2 BNNK yaitu dengan menggunakan kuesioner ketahanan keluarga yang dilaksanakan secara sampling dengan instrumen ukur ketahanan keluarga yang mencakup 3 dimensi yaitu Sistem keyakinan (*belief system*), Proses Organisasi (*Organizational Process*), dan Proses Komunikasi (*Communication/Problem-solving processes*).

Tahapan Pengukuran yang dilakukan mulai dari intervensi hingga pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

- a. Pemilihan target sasaran, dimana target yang dimaksud adalah desa/kelurahan
 - b. Pemilihan keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua
 - c. Pemilihan 10 (sepuluh) responden keluarga
 - d. Responden keluarga yang terpilih akan mengisi kuesioner di kertas
 - e. Fasilitator akan menyalin jawaban responden ke link kuesioner yang telah dibagikan
 - f. Nilai hasil pengukuran akan terakumulasi di BNN Pusat
3. Hasil pengukuran indikator hingga triwulan IV seluruh satker di BNNP Kalteng mencapai 100% dengan 2 BNN Kab/Kota tercapai targetnya berkategori nilai Tinggi dengan rincian sebagai berikut:

NO	SATKER	TARGET	CAPAIAN	KATEGORI
1	BNN Kota Palangka Raya	78,68	79,20	Tinggi
2	BNN Kab. Kotawaringin Barat	78,68	80,27	Tinggi
DEKTARA PROV KALIMANTAN TENGAH			83,75	Tinggi

Indikator kinerja Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori Tinggi di wilayah Provinsi Kalteng untuk capaiannya sama dengan tahun 2021 yakni terdapat 2

Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori Tinggi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2022 BNNP Kalteng dapat mempertahankan ketercapaian target dari tahun sebelumnya.

4. Perbandingan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir

Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir :

Satker	2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
BNNP Kalimantan Tengah	-	-	78,67	86,25	78,68	83,75
BNNK Palangka Raya	-	-	78,67	82,41	78,68	79,20
BNNK Kotawaringin Barat	-	-	78,67	82,41	78,68	80,27

Pada tahun 2020, kegiatan penyelenggaran advokasi memiliki indikator kinerja yang berbeda dengan tahun 2021 dan 2022 yakni jumlah institusi/ lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba. Perbedaan indikator ini mengakibatkan capaian kinerja 2020 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dan 2022.

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2020	-	-	-
2021	2 kab/ kota	2 kab/ kota	100 %
2022	2 kab/ kota	2 kab/ kota	100 %

Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021, secara persentase, maka capaian kinerja BNNP Kalimantan Tengah tetap yakni sebesar 100 %. Semua BNNK berhasil mencapai target pada dua tahun berturut-turut karena BNNP Kalteng telah melakukan koordinasi yang lebih baik dan melanjutkan rangkaian kegiatan advokasi diantaranya:

5. Permasalahan yang dihadapi
 - a. Keluarga kurang fokus terhadap pelaksanaan kegiatan dikarenakan masih memikirkan pekerjaan di luar.
 - b. Fasilitator belum maksimal dalam memberikan informasi saat kegiatan.
6. Faktor yang menunjang

Adanya dukungan dari pimpinan, Pembina Fungsi terhadap pelaksanaan kegiatan di Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
7. Sebagai Rekomendasi Perbaikan ke depan

Meningkatkan informasi dan edukasi kepada sasaran keluarga dalam rangka meningkatkan daya tangkal terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
8. Upaya yang Telah Dilakukan

BNNP Kalteng telah melakukan koordinasi yang lebih baik dan melanjutkan rangkaian kegiatan advokasi di antaranya:

 1. Mengembangkan desa bersinar yang telah dibentuk sehingga dapat secara mandiri melaksanakan kegiatan-kegiatan desa bersinar;
 2. Menambah desa bersinar baru sehingga lebih banyak lagi desa yang bebas dari narkoba;
 3. Melakukan Pemantauan secara berkelanjutan kepada keluarga yang telah mendapatkan Fasilitasi Ketahanan Keluarga.



Kepala BNNP Kalteng Menjadi Narasumber dalam Kegiatan Workshop Penggiat P4GN di Dunia Usaha/Lingkungan Swasta

3

SASARAN :

“Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN”

Sasaran ketiga di atas dapat di implementasikan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
3.	Jumlah Kabupaten/ Kota dengan Indeks kemandirian partisipasi berkategori Mandiri di Wilayah Provinsi	2 Kabupaten/ Kota	2 Kabupaten/ Kota	100 %

1. Definisi Operasional

Jumlah Instansi Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian partisipasi berkategori mandiri di Wilayah Provinsi adalah angka capaian peran serta

dan kemandirian masyarakat (para Penggiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN terdiri dari Lingkungan Kerja (Pemerintah dan swasta), Lingkungan Pendidikan dan Lingkungan Masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba.

2. Metode Pengukuran

Adapun Instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia

Adanya pelaku/pelaksana sebagai figure yang biasa menyuarakan, mengajak dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungan.

2) Metode

Adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan pelaksanaan ter urin) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.

3) Anggaran

Adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN didalam dan di luar lingkungan masing-masing.

4) Material

Adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.

5) Sistem (kebijakan)

Adanya sistem, regulasi aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.

6) Aktivitas

Adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah Pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

Pengukuran dilakukan dengan mengidentifikasi jumlah kemandirian P4GN(input,output dan outcome) dari masing-masing Instansi/lembaga di

Wilayah kabupaten/kota dengan Kategori mandiri. Prosedur pengukuran melalui Pembagian Kuesioner IKP kepada Para Penggiat yang telah mengikuti kegiatan Pengembangan kapasitas (workshop) yang diselenggarakan oleh BNNP Kalimantan Tengah dan jajarannya.

Identitas kawasan / Wilayah rawan Narkoba yang diintervensi/ mendapatkan program Pemberdayaan Anti Narkoba.

3. Hasil Pengukuran

Dari 2 Kabupaten/Kota yang menjadi target BNNP Kalteng semua BNNK mendapatkan nilai Indeks Kemandirian partisipasi di atas target yang ditetapkan dengan Kategori Mandiri dan sangat Mandiri. Adapun rincian capaiannya sebagai berikut :

No	Satker	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
1.	BNN Kota Palangka Raya	3,20	3,42	106,8 %	Sangat Mandiri
2	BNN Kabupaten Kotawaringin Barat	3,20	3,88	121,3 %	Sangat Mandiri

Indikator kinerja Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks kemandirian Partisipasi berkategori Mandiri di Wilayah Provinsi untuk capaiannya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan dimana tahun 2022 rata-rata capaian 112 % dibanding tahun 2021 yang hanya 101,5%.

4. Perbandingan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir

Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir:

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2020	-	-	-
2021	2 kab/ kota	2 kab/ kota	100 %
2022	2 kab/ kota	2 kab/ kota	100 %

Pada tahun 2020, kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat memiliki indikator kinerja yang berbeda dengan tahun 2021 dan 2022 yakni Jumlah instansi/ lingkungan masyarakat yang turut berpartisipasi dalam Program

Pemberdayaan Anti Narkoba. Perbedaan indikator ini mengakibatkan capaian kinerja 2020 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dan 2022.

Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2021, secara persentase, maka capaian kinerja BNNP Kalimantan Tengah tetap sebesar 100 %. Semua BNNK berhasil mencapai target pada dua tahun berturut-turut.

5. Permasalahan yang dihadapi

Ada beberapa faktor yang menyebabkan program pemberdayaan peran serta masyarakat khusus advokasi kebijakan KOTAN menjadi kurang optimal, diantaranya:

- 1) Kurangnya konsistensi lembaga dalam mengikuti proses kegiatan pemberdayaan.
- 2) Pengambil kebijakan dalam instansi/lingkungan selalu mengirimkan perwakilan untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan.
- 3) Sebagian peserta kegiatan tidak melaporkan hasil kegiatan (rencana tindak lanjut) kepada pimpinan lembaga dan juga pelaksanaan kegiatan tidak dilaporkan ke BNNP Kalteng.
- 4) Belum semua instansi menerapkan regulasi atau aturan-aturan yang mengikat dalam hal P4GN dan regulasi yang sudah ada belum dilaksanakan dengan baik.
- 5) Penganggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat anti narkoba belum menjadi prioritas di beberapa lembaga dikarenakan belum masuk dalam penilaian kinerja lembaga.

6. Faktor yang menunjang

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian target karena adanya koordinasi yang baik antara BNN dengan stakeholder terkait.

7. Sebagai Rekomendasi Perbaikan ke depan

Pada Triwulan ke IV kegiatan workshop pada semua jajaran BNNK harus dapat berjalan sehingga di bulan November dan awal Desember kegiatan Monitoring dan evaluasi sudah bisa dilaksanakan untuk menilai tingkat kemandirian semua

Stakeholder yang sudah diberikan kegiatan Banpas sebelumnya.

8. Upaya yang Telah Dilakukan

- a. BNNP Kalteng telah meningkatkan advokasi kebijakan KOTAN
- b. Pembinaan dan koordinasi serta melanjutkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan seperti melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan regulasi berupa Perda.
- c. Pembentukan tim KOTAN.
- d. Pembuatan RAD, sosialisasi, deteksi dini melalui tes urine.
- e. Monitoring dan evaluasi pada instansi pemerintah, lingkungan swasta, masyarakat dan pendidikan terutama pada 5 (lima) kabupaten yang secara vertikal belum terbentuk BNNK.



Sosialisasi Inpres 02 Tahun 2020 Dan Kotan (Kota / Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba) di Pemerintah Kabupaten Sukamara

4	SASARAN : “Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah Rawan Narkoba secara Berkelanjutan”
----------	---

Sasaran keempat di atas diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
4.	Jumlah Kawasan rawan di Wilayah Provinsi yang beralih status dari bahaya menjadi waspada	1 (satu) Kawasan/ Wilayah Rawan	1	100 %
5.	Nilai Keterpulihan Kawasan rawan yang diintervensi	2,85	2,97	104,3 %

Indikator kinerja : Jumlah Kawasan rawan di Wilayah Provinsi yang beralih status dari bahaya menjadi waspada

1. Definisi Operasional

Keterpulihan suatu kawasan rawan adalah ditentukan berdasarkan indeks keterpulihan suatu kawasan rawan narkoba dengan jumlah kawasan atau wilayah rawan narkoba yang di intervensi mendapatkan Program Pemberdayaan Anti narkoba

2. Metode Pengukuran

Pengukuran dilakukan dengan melakukan Penilaian Hasil Capaian melalui Monitoring dan Evaluasi terhadap Program dan kegiatan dalam Upaya P4GN dan ada beberapa lagi item pengukuran antara lain yaitu Penyelenggaraan Program, Pelaksana Program, Keberlanjutan Program, Sinergitas Instansi Pemerintah, Kemitraan Dunia Usaha, Pelibatan Organisasi Sosial Masyarakat dan hasil Program yang dirasakan Masyarakat.

Prosedur pengukuran melalui penelitian/survey pada kawasan rawan sejauh mana aturan atau kebijakan dan pelaksanaan Program Kegiatan dalam Upaya P4GN.

Identitas kawasan / Wilayah rawan Narkoba yang di Intervensi mendapatkan program Pemberdayaan Anti Narkoba :

- a. Nama wilayah : Kawasan Jalan Mendawai, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

- b. Jumlah dibina : 15 Orang yang berasal dari masyarakat kawasan rawan dan masyarakat yang mempunyai keluarga mantan pecandu Narkoba.
- c. Pelatihan lifeskill : Kuliner / Aneka Sambal dan Makanan ringan
- d. Pihak/Instansi Pemerintah yang Membantu :
 - 1. Balai Latihan Kerja Dinas Kota Palangka Raya
 - 2. Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya
 - 3. Lurah Palangka
 - 4. Tokoh Masyarakat
 - 5. UPTD Pasar
 - 6. Dunia Usaha (Sendys Swalayan)
 - 7. Ketua RT/Tokoh Masyarakat : Mendampingi masyarakat binaan dan menjadi fasilitator antara masyarakat binaan dengan BNNP Kalteng dan Pemerintah setempat
- e. Kawasan : Perkotaan

2. Hasil Pengukuran

Selain itu juga telah dilakukan perhitungan kuesioner program dan kegiatan kewirausahaan (KPKK) untuk mengevaluasi program dan kegiatan kewirausahaan masyarakat yang telah dilakukan di kawasan rawan, ada 10 aspek yang dinilai yaitu:

- a. Aspek Program Kewirausahaan
- b. Aspek Manajemen Program
- c. Aspek Jejaring Kerja Dalam Program
- d. Aspek Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Program
- e. Aspek Dukungan Dunia Usaha Dalam Program
- f. Aspek Dukungan Praktisi & Akademisi Dalam Program
- g. Aspek Keberlanjutan Kegiatan Dalam Program
- h. Aspek Pembinaan Usaha Dalam Program
- i. Aspek Manfaat (Efek) Program Terhadap keberdayaan masyarakat
- j. Aspek Dampak Program Terhadap Lingkungan Bersih Narkoba

Aspek-aspek tersebut dituangkan dalam Kuesioner Program dan Kegiatan Kewirausahaan (KPKK) dan Kuesioner tersebut diisi oleh warga penerima program lalu diolah dengan hasil perhitungannya sbb:

HASIL PERHITUNGAN KUSIOENER PENILAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN ALTERNATIF DI JALAN MENDAWAI KEL. PALANGKA - BNNP KALTENG TAHUN													
Respon- den	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3	Aspek 4	Aspek 5	Aspek 6	Aspek 7	Aspek 8	Aspek 9	Aspek 10	Total	Rata-rata	Kategori
1	3	1	4	3	2	2	1	3	4	4	27	2,70	Baik
2	3	1	4	3	2	1	2	4	2	3	25	2,50	Cukup
3	3	1	1	2	2	2	2	2	2	2	19	1,90	Cukup
4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21	2,10	Cukup
5	3	4	3	4	2	3	4	3	4	4	34	3,40	Sangat Baik
6	4	4	3	1	1	1	1	1	2	2	20	2,00	Cukup
7	3	4	3	4	2	3	4	3	4	4	34	3,40	Sangat Baik
8	4	4	3	1	1	2	2	1	2	2	22	2,20	Cukup
9	4	4	3	1	1	3	1	3	3	2	25	2,50	Cukup
10	3	2	2	3	2	2	2	2	4	4	26	2,60	Baik
11	4	4	2	1	2	2	2	3	2	2	24	2,40	Cukup
12	3	2	3	3	2	2	2	4	4	4	29	2,90	Baik
13	3	2	2	4	2	2	1	1	2	2	21	2,10	Cukup
14	3	4	3	4	3	2	2	3	4	4	32	3,20	Baik
15	3	3	3	4	4	2	2	2	2	2	27	2,70	Baik
Jumlah	49	42	41	40	30	31	30	37	43	43	386	38,60	
Rata-	3,27	2,80	2,73	2,67	2,00	2,07	2,00	2,47	2,87	2,87	2,57		Baik
Kategori	Sangat Baik	Baik	Baik	Baik	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik		

Dari hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan kuesioner penilaian program dan kegiatan kewirausahaan bernilai 2,57 (baik)

Setelah dilakukan perhitungan dari 15 Kuesioner yang diisi oleh warga penerima program, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Program dan kegiatan kewirausahaan masyarakat kawasan rawan narkoba di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan penilaian masing-masing responden/Masyarakat (15 Responden) terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kewirausahaan dengan kategori "Baik" (dengan tentang nilai 1,90 – 3,40) dengan rincian 2 responden kategori "sangat baik", 5 responden kategori "baik" dan 8 responden kategori "cukup".
- b. Berdasarkan penilaian responden/masyarakat terhadap 10 aspek pelaksanaan program dan kegiatan kewirausahaan, dengan kategori "Baik" (dengan rentang nilai 2,00 – 3,27) dengan rincian 1 aspek "sangat Baik", 5 aspek "Baik" dan 4 aspek "Cukup".

- c. Nilai akhir rata-rata seluruh responden/masyarakat terhadap seluruh pelaksanaan program dan kegiatan kewirausahaan, dengan kategori Baik dengan nilai rata-rata 2,57 (Baik).

Kegiatan yang telah dilakukan

Kawasan atau wilayah rawan yang di intervensi program pemberdayaan alternatif BNNP Kalimantan Tengah menyasar di Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya karena berdasarkan hasil pemetaan kawasan dengan menggunakan 8 indikator utama dan 5 indikator pendukung daerah tersebut dikategorikan wilayah "BAHAYA". Pembinaan kawasan rawan narkoba oleh BNNP Kalimantan Tengah dilaksanakan dalam bentuk Bimtek lifeskill pembuatan aneka sambal dan aneka makanan ringan. Pemberdayaan di wilayah ini dapat dikatakan berhasil karena peserta telah berhasil membuat dan menjual aneka makanan ringan ke pasar-pasar tradisional dan swalayan terdekat. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan dan hasil produk dari binaan kawasan rawan narkoba Jalan Mendawai Kelurahan Palangka Kec. Jekan Raya:



Bimtek Lifeskill Pemberdayaan Alternatif di Jalan Mendawai



Hasil Pelatihan Bimtek Lifeskill

4. Perbandingan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir

Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir :

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2020	1 kawasan	1 kawasan	100 %
2021	1 kawasan	1 kawasan	100 %
2022	1 kawasan	1 kawasan	100 %

Pada tahun 2020, kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif memiliki indikator kinerja Jumlah kawasan/ wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 memiliki indikator kinerja Jumlah Kawasan rawan di Wilayah Provinsi yang beralih status dari bahaya menjad waspadai. Sekilas indikator di 2020 dan tahun-tahun berikutnya terlihat berbeda, namun sebenarnya untuk tahun 2021 dan 2022 ditambahkan target kualitas berupa status rawan. Sejak tahun 2020 hingga 2022 capaian kinerja BNNP Kalimantan Tengah tetap yakni sebesar 100%.

5. Permasalahan yang dihadapi

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja ini adalah masih kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat daerah rawan dengan berbagai latar belakang dan alasan. Program pemberdayaan alternatif membutuhkan peran serta seluruh pihak terutama dukungan dari dunia usaha dan akademisi. Program Pemberdayaan tidak dapat dilakukan dalam waktu

singkat karena merubah cara pandang dan cara hidup masyarakat memerlukan waktu yang cukup panjang dengan dukungan sumber daya yang memadai.

6. Faktor yang menunjang

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian target karena adanya koordinasi yang baik antara BNN dengan stakeholder terkait.

7. Sebagai Rekomendasi Perbaikan ke depan

BNNP Kalteng bersama dengan fasilitator akan melakukan bimtek fasilitator (pendamping), pelibatan stakeholder dan melakukan monitoring ke wilayah untuk mengetahui perkembangan program, selain itu juga terus akan membangun jejaring kerja kewirausahaan dengan para stakeholder yang ada. Dalam hal perekrutan peserta bimbingan teknis *lifeskill* akan lebih memprioritaskan kepada mantan pecandu Narkoba atau keluarganya dan masyarakat yang berada di lingkungan kawasan rawan Narkoba.

8. Upaya yang Telah Dilakukan

- a. BNNP Kalteng bersama dengan fasilitator telah melakukan bimtek fasilitator (pendamping).
- b. Melibatkan stakeholder dan melakukan monitoring ke wilayah untuk mengetahui perkembangan program.

Indikator kinerja : Nilai Keterpulihan Kawasan rawan yang diintervensi

1. Definisi Operasional

Keterpulihan suatu kawasan rawan adalah ditentukan berdasarkan indeks keterpulihan suatu kawasan rawan narkoba dengan jumlah kawasan atau wilayah rawan narkoba yang di Intervensi mendapatkan Program Pemberdayaan Anti narkoba.

2. Metode Pengukuran

Pengukuran dilakukan dengan Penilaian Hasil Capaian melalui Monitoring dan Evaluasi terhadap Program dan kegiatan dalam Upaya P4GN dan ada beberapa lagi item pengukuran antara lain yaitu Penyelenggaraan Program, Pelaksana Program, Keberlanjutan Program, Sinergitas Instansi Pemerintah,

Kemitraan Dunia Usaha, Pelibatan Organisasi Sosial Masyarakat dan hasil Program yang dirasakan Masyarakat.

3. Hasil Pengukuran

Pada akhir tahun diadakan perhitungan Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR) Narkoba dengan menggunakan kuesioner. Pengambilan data dengan menggunakan kuesioner ke 15 orang warga penerima manfaat, adapun hasilnya sebagai berikut:

HASIL PERHITUNGAN KUESIONER INDEKS KETERPULIHAN KAWASAN RAWAN NARKOBA PROGRAM PEMBERDAYAAN ALTERNATIF DI JALAN MENDAWAI KEL. PALANGKA - BNNP KALTENG TAHUN 2022																		
No	Variabel	Indikator	Bobot	Respon 1	Respon 2	Respon 3	Respon 4	Respon 5	Respon 6	Respon 7	Respon 8	Respon 9	Respon 10	Respon 11	Respon 12	Respon 13	Respon 14	Respon 15
1	Indikator Pokok Kawasan Narkoba	Adanya Bandar Narkoba		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2		Adanya Produksi Narkoba		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3		Adanya Entry Point Narkoba		2	4	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	2	3	3
4		Adanya Kurir Narkoba		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5		Adanya Pecandu Narkoba		4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3
6		Adanya Kasus Narkoba		4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3
7		Adanya BB Narkoba		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8		Adanya Kejahatan Umum		3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
9	Indikator Pendukung	Terawastinya Tempat Hiburan		2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	3	2	3
10		Memurninya Angka Kemiskinan		1	3	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1
11		Terawastinya Kos-kosan		1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2
12		Bertambahnya Sarana Publik		3	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2
13		Meningkatnya Interaksi Sosial		3	3	2	2	3	2	3	2	2	3	2	2	3	3	3
14	Tingkat Keberhasilan Program	Hasil yang dirasakan Masy		1	3													
15		Keberlanjutan Program		2	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2
16		Pelaksanaan Program		3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17		Pelaksanaan Program		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18		Sinergi Instansi Pemerintah		3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
19		Kemiskinan Dunia Usaha		1	2	1	1	1	2	2	3	3	3	2	1	1	3	2
20		Dampak Keberdayaan Masy		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		Jumlah Total (N=20)	0	217,00	261,00	206,00	199,00	236,00	223,00	238,00	234,00	245,00	254,00	241,00	240,00	240,00	249,00	238,00
		Nilai IKKR		2,75	3,30	2,81	2,52	2,90	2,82	3,01	2,96	3,10	3,22	3,05	3,04	3,04	3,15	3,01
		Nilai IKKR Rata-rata		2,97														
		Nilai IKKR Konversi		74,28														
		Kategori IKKR		C														
		Kriteria Keterpulihan		SIAGA														

Dari hasil perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa indeks keterpulihan kawasan rawan (IKKR) pada wilayah Kelurahan Palangka adalah "Siaga" dengan Nilai IKKR 2,97 (SIAGA), jika dibandingkan dengan hasil pemetaan kawasan rawan pada awal tahun 2022 dengan menggunakan tools 8 indikator pokok dan 5 Indikator pendukung wilayah Kelurahan Palangka dalam kategori "Bahaya" dan hasil IKKR awal dengan nilai 1,47 (BAHAYA). Ini berarti kondisi kawasan tersebut lebih baik (pulih).

4. Perbandingan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir

Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir :

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2020	-	2,54	-
2021	1,8	3,17	176,11%
2022	2,85	2.97	104,3%

Pada tahun 2020, kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif memiliki indikator kinerja Jumlah kawasan/ wilayah rawan narkoba yang diintervensi Program Pemberdayaan Alternatif dengan hasil perhitungan nilai IKKR 2,54 namun tidak ada target awal. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 telah ada target IKKR untuk kawasan rawan yang diintervensi. Target pada tahun 2021 dan 2022 tercapai.

5. Permasalahan yang dihadapi

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja ini adalah masih kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat daerah rawan dengan berbagai latar belakang dan alasan. Program pemberdayaan alternatif membutuhkan peran serta seluruh pihak terutama dukungan dari dunia usaha dan akademisi. Program Pemberdayaan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat karena merubah cara pandang dan cara hidup masyarakat memerlukan waktu yang cukup panjang dengan dukungan sumber daya yang memadai.

6. Faktor yang menunjang

Terlibatnya para pemangku kepentingan yang ada di wilayah kawasan rawan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi sehingga mereka mempunyai rasa memiliki dan menjadi bagian dari program menjadi kunci keberhasilan program disamping itu tenaga pelaksana program terus mengadvokasi mereka untuk terus berupaya mengubah kawasan rawan menjadi kawasan bersih dari narkoba.

7. Sebagai rekomendasi perbaikan ke depan

BNNP Kalteng bersama dengan fasilitator akan melakukan bimtek fasilitator (pendamping), pelibatan stakeholder dan melakukan monitoring ke wilayah untuk mengetahui perkembangan program, selain itu juga terus akan membangun jejaring kerja kewirausahaan dengan para stakeholder yang ada.

Dalam hal perekrutan peserta bimbingan teknis lifeskill akan lebih memprioritaskan kepada mantan pecandu narkoba atau keluarganya dan masyarakat yang berada di lingkungan kawasan rawan narkoba.

8. Upaya yang Telah Dilakukan

- a. BNNP Kalteng bersama dengan fasilitator telah melakukan bimtek fasilitator (pendamping).
- b. Melibatkan stakeholder dan melakukan monitoring ke wilayah untuk mengetahui perkembangan program.

5.

Sasaran : Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	PERSENTASE
6.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	15 orang	15 orang	100%
7.	Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 orang	10 orang	100%

Indikator Kinerja : Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih

1. Definisi Operasional

Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah jumlah agen pemulihan yang dilatih.

2. Metode Pengukuran

Pengukuran dilakukan dengan menghitung total petugas penyelenggara layanan IBM (agen pemulihan) yang dilatih.

3. Hasil Pengukuran

Dari target 15 orang yang mendapatkan pelatihan, realisasi 15 orang yang diberikan pelatihan. Adapun petugas yang telah dilatih untuk layanan IBM yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT	NO. HP	BINAAN	KET
1.	SITI NORHASANAH	JL. GURAME II NO. 19 PALANGKA RAYA	082251630837	BNNP KALIMANTAN TENGAH	PETUGAS AGEN PEMULIHAN
2.	SARI YANTI LESTARI	JL. KINIBALU GG. DAMAI PALANGKA RAYA	081345419921		
3.	SETIYANINGSIH	JL. SAKAN V PALANGKA RAYA	082148483604		
4.	AHMAT YUNANI	JL. MENDAWAI, KOMPLEK SOSIAL PALANGKA RAYA	081250037600		
5.	EKA JUHAIRIYAH	JL. DR. MURJANI GG. RAHAYU NO. 99 PALANGKA RAYA	081257338266		
6.	SOEKIRAN	JL. TJILIK RIWUT KM.12 PALANGKA RAYA	082158398299	BNNK PALANGKA RAYA	
7.	FAJAR QAMARULLAH	JL. RAFLESIA RT.05/RW.02 PALANGKA RAYA	082354002944		
8.	ZAINUDDIN	JL. PETUK KATIMPUN RT.03/RW.01 PALANGKA RAYA	082157902907		
9.	EVALINA BR. GINTING, S.ST	JL. RAFLESIA RT.05/RW.02 PALANGKA RAYA	08125074424		
10.	RIA AGUSTINA	JL. PETUK KATIMPUN RT.03/RW.01	082152957246		

		PALANGKA RAYA			
11.	FRANCISCO GERRITS	JL. TRANLIK 1 RT. 11 PERUM PASIR AMS NO. C4 DESA PASIR PANJANG	081251135815	BNNK KOTAWARINGIN BARAT	
12.	ACHMAD SODIQIN	JL GRAHA ASRI RAYA BTN GRAHA MAS 7 GG. NILA NO. 38 RT 23 DESA PASIR PANJANG	085822575753		
13.	GIATMI	JL. BHAYANGKARA PERUM GRAHA MAS RT 25 DESA PASIR PANJANG	082156590482		
14.	SITI KHOTIJAH	JL. PRAMUKA BTN AKASIA PERMAI BLOK C NO. 95 RT 15 DESA PASIR PANJANG	081349288989		
15.	NENGSIH ANANG JARNI	JL. ARIS KARTADIPURA RT. 01 DESA PASIR PANJANG	085787116621		

4. Perbandingan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir

Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir :

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2020	-	-	100 %
2021	10 orang	10 orang	100 %
2022	15 orang	15 orang	100 %

Pada tahun 2020, kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi memiliki indikator kinerja yang berbeda dengan tahun 2021 dan 2022 yakni jumlah fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang operasional. Perbedaan indikator ini mengakibatkan capaian kinerja 2020 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dan 2022. Namun untuk tahun 2021 dan 2022 semua target

tercapai, bahkan saat target ditambah di tahun 2022, target tetap dapat tercapai. Dua tahun berturut-turut capaian sebesar 100%.

5. Permasalahan yang dihadapi

- 1) Beberapa petugas Agen Pemulihan yang telah dilatih belum menjalankan tugasnya secara penuh;
- 2) Adanya pekerjaan utama menyebabkan beberapa petugas Agen Pemulihan belum mampu menjalankan tugasnya sebagai Petugas Agen Pemulihan secara maksimal;
- 3) Belum adanya dukungan operasional dari pihak kelurahan/desa, sehingga dukungan anggaran atau operasional tidak hanya berasal dari BNNP/BNNKab/BNNK saja.

6. Faktor yang menunjang

- 1) Pemilihan Petugas Agen Pemulihan selektif sesuai syarat dan ketentuan untuk menjadi Petugas Agen Pemulihan serta keterlibatan Pihak Kelurahan/Desa setempat dalam pemilihan tersebut;
- 2) Informasi kepada Pihak Kelurahan/Desa agar dalam pemilihan Petugas Agen Pemulihan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Pedoman atau Petunjuk Teknis Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM);
- 3) Kelurahan/Desa yang menganggarkan dana operasional bagi Petugas Agen Pemulihan guna mendukung dana operasional bagi Petugas Agen Pemulihan yang melakukan layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah tersebut.

7. Sebagai rekomendasi perbaikan ke depan

- 1) Melakukan koordinasi secara intens dengan Pihak Kelurahan/Desa untuk rekomendasi Petugas Agen Pemulihan yang memenuhi syarat dan dalam menganggarkan dana operasional bagi Petugas Agen Pemulihan di Wilayah tersebut;
- 2) Melakukan sinergitas terkait petugas atau relawan yang telah dibentuk Bidang P2M di Wilayah IBM/Desa Bersinar;

- 3) Memberikan pendampingan secara intens bagi Petugas Agen Pemulihan yang telah dilatih sehingga Petugas Agen Pemulihan dapat menjalankan tugasnya secara konsisten dan maksimal.

8. Upaya yang Telah Dilakukan

Melakukan pemilihan petugas IBM dengan melibatkan Pihak Kelurahan setempat dan melakukan pemilihan sesuai dengan syarat dan ketentuan untuk menjadi Petugas IBM.

Indikator Kinerja : Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis

1. Definisi Operasional

Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis pada tahun 2022 dengan target 10 orang petugas lulus uji kompetensi.

2. Metode Pengukuran

Pengukuran dilakukan dengan menghitung jumlah petugas yang mendapat rekomendasi kompeten oleh Asesor dari LSP BNN RI.

3. Hasil Pengukuran

Adapun daftar nama-nama petugas yang mengikuti uji sertifikasi BNNP Kalimantan Tengah sebanyak 14 orang dan yang berhasil lulus sebanyak 10 orang sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI	HASIL REKOMENDASI
1	Dorce Sanda, SKM., MPH	BNNP Kalteng	KOMPETEN
2	Dwi Irma Yuniarti, S. Psi	BNNP Kalteng	KOMPETEN
3	Rifqi Alwafi P.N, S. Psi	BNNP Kalteng	KOMPETEN
4	Astrid Swandira Balkis, S. Psi	BNNP Kalteng	KOMPETEN
5	Bayu Pratama, SKM	BNNP Kalteng	KOMPETEN
6	James Pardomuan S, S. Kep., Ns	BNNP Kalteng	KOMPETEN
7	I Kadek Ady Wiratama, S. Pd	BNNP Kalteng	KOMPETEN
8	Vio Fajar W, S. Sos	BNNK Palangka Raya	KOMPETEN
9	dr. Sherly Meygaretha	RSJ Kalawa Atei	BELUM KOMPETEN
10	dr. Fitri Ningrum Intani	RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kapuas	BELUM KOMPETEN
11	Faisal Rahman, AMK	RSUD Kuala Pembuang	KOMPETEN

12	Leliana Sijabat, S. Kep., NS	LAPAS Narkotika Kelas IIA Kasongan	KOMPETEN
13	Marlyadhi, A.Md., Kep	LAPAS Narkotika Kelas IIA Kasongan	BELUM KOMPETEN
14	Welly Rhatomy, A.Md., Kep	LAPAS Narkotika Kelas IIA Kasongan	BELUM KOMPETEN

4. Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir :

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2020	-	-	-
2021	15 orang	12 orang	80 %
2022	10 orang	10 orang	100 %

Pada tahun 2020, kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi memiliki indikator kinerja yang berbeda dengan tahun 2021 dan 2022. Perbedaan indikator ini mengakibatkan capaian kinerja 2020 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dan 2022. Untuk tahun 2021 capaian persentase 80% dari target sedangkan tahun 2022 target tercapai 100%, sehingga terjadi peningkatan capaian sebesar 20%.

5. Permasalahan yang dihadapi

- 1) Petugas yang telah memperoleh peningkatan kapasitas di lembaga tempat rehabilitasi instansi pemerintah belum sepenuhnya melakukan layanan dengan menggunakan *tools* yang telah ditetapkan oleh Pihak LSP/Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI kepada klien, sehingga petugas belum mampu mengaplikasikan *tools* tersebut secara maksimal kepada klien;
- 2) Petugas rehabilitasi belum mendapatkan pelatihan secara menyeluruh (hanya pelatihan UTC-5 atau Pelatihan Asesmen), sehingga tidak semua teknik konseling maupun asesmen dapat diterapkan saat mengikuti Uji Sertifikasi Konselor Adiksi;
- 3) Sistem pencatatan dan pelaporan belum sesuai dengan formulir yang ada.

6. Faktor yang menunjang

- 1) Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam menyiapkan tempat rehabilitasi di setiap kabupaten sangat diperlukan guna mendekatkan akses layanan rehabilitasi bagi klien di Wilayah Kalimantan Tengah, selain itu petugas layanan rehabilitasi yang telah memperoleh peningkatan kapasitas lebih kompeten dan tersertifikasi;
- 2) Dukungan stakeholder terkait dalam hal pengalokasian dana penyelenggaraan layanan rehabilitasi di masing-masing wilayah;
- 3) Adanya jejaring kerja sama dengan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah serta melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga tersebut secara berkala;
- 4) Sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi khususnya dengan lembaga mitra.

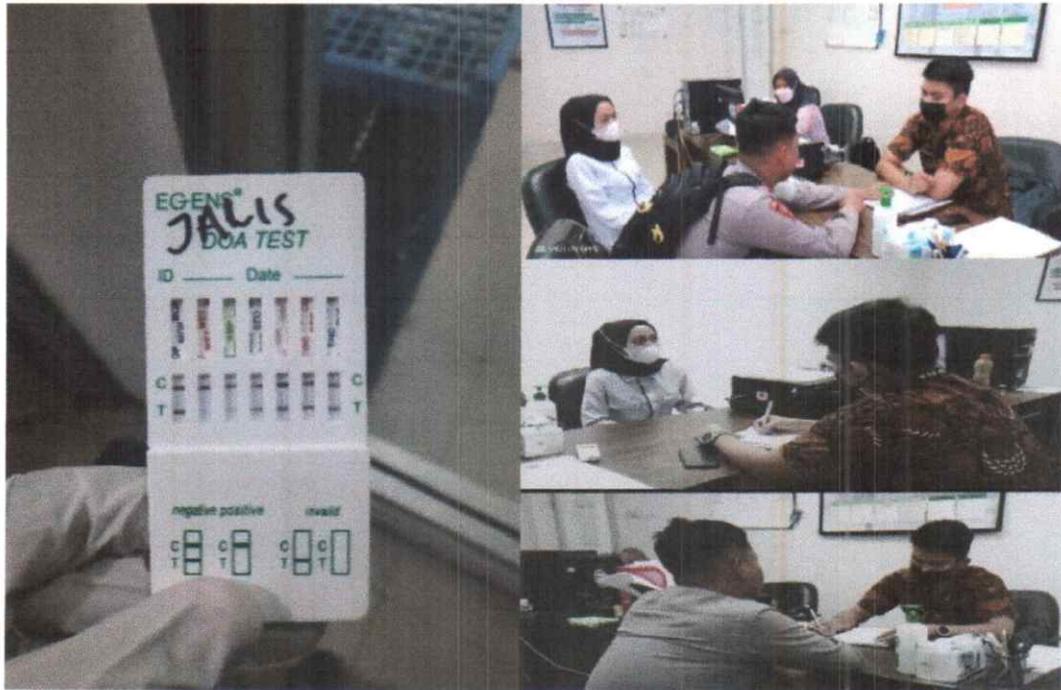
7. Sebagai rekomendasi perbaikan ke depan

- 1) Pihak BNNP Kalimantan Tengah melakukan Bimbingan Teknis dan Monitoring Evaluasi secara berkala kepada SDM (Petugas Rehabilitasi) di Lembaga Rehabilitasi baik Instansi Pemerintah maupun di Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat;
- 2) Melakukan peningkatan kemampuan secara berkala dengan pembaharuan materi atau kurikulum kepada Petugas Rehabilitasi yang ada di LRIP maupun LRKM yang telah bekerja sama dengan BNNP Kalimantan Tengah agar dapat mengaplikasikan dan menunjang layanan rehabilitasi yang diberikan petugas rehabilitasi kepada klien;

8. Upaya yang Telah Dilakukan

- a. Mendorong Pemda untuk menyiapkan tempat rehabilitasi;
- b. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam hal pengalokasian dana penyelenggaraan layanan rehabilitasi;

- c. Membangun jejaring kerja sama dengan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah serta melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga tersebut secara berkala.



Penerimaan Awal Klien Rehabilitasi

6. Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	PERSENTASE
8.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	2	2	100%
9.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	3	4	133,33%

Indikator kinerja : Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi

1. Definisi Operasional

Lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah lembaga yang memenuhi capaian lembaga rehabilitasi dengan kriteria A/B. Jika 70% dari persyaratan umum dan khusus yang ada dalam SNI 8807 terpenuhi maka masuk dalam kategori B. Jika 85% dari persyaratan umum dan khusus yang ada dalam SNI 8807 terpenuhi maka masuk dalam kategori A.

2. Metode Pengukuran

Pengukuran dilakukan oleh PJ SNI BNNP Kalimantan Tengah, kemudian PJ melakukan paparan secara virtual pada direktorat PLRKM dan menyampaikan data dukung dan hasil penilaiannya. Kemudian direktorat PLRKM melakukan penilaian dan evaluasi.

3. Hasil Pengukuran

Adapun daftar lembaga di Kalimantan Tengah yang telah dinilai dan memenuhi verifikasi pemenuhan SPM/SNI regular tahun 2022 adalah:

NO	NAMA LEMBAGA	SETTING LAYANAN	KATEGORI NILAI
1	Klinik Pratama BNN Kabupaten Kotawaringin Barat	RJ-Medis	A
2	Klinik Pratama Berkah BNN Kota Palangka Raya	RJ-Medis	B

4. Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir :

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2020	-	-	-
2021	-	1 lembaga	-
2022	2 lembaga	2 lembaga	100 %

Pada tahun 2020, kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Pemerintah memiliki indikator kinerja yang berbeda dengan tahun 2021 dan 2022. Perbedaan indikator ini mengakibatkan capaian kinerja 2020 tidak dapat

dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dan 2022. Untuk tahun 2021 BNNP Kalimantan Tengah tidak ditargetkan jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi SPM tetapi BNNP di Kalimantan Tengah ternyata terdapat 1 lembaga yang memenuhi SPM. Pada tahun 2022 ditargetkan 2 lembaga yang memenuhi SPM dan berhasil tercapai 100%. Terdapat peningkatan jumlah lembaga yang memenuhi pelayanan SPM dari 2021 ke 2022.

5. Permasalahan yang dihadapi

- 1) Anggaran yang ada di Klinik BNNP/Kab/Kota terbatas terkait pemenuhan sarana pra sarana dan dokumentasi penunjang layanan lainnya;
- 2) Petugas klinik/rehabilitasi belum sepenuhnya mendapatkan pelatihan secara keseluruhan dan belum sepenuhnya tersertifikasi;
- 3) Terbatasnya tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) di Klinik;
- 4) Layanan yang diberikan belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga Standar Operasional Prosedur (SOP), dokumentasi, maupun Pedoman Layanan belum terpenuhi dan lengkap.

6. Faktor yang menunjang

- 1) Koordinasi penanggung Jawab SNI BNNP Kalimantan Tengah dan Jajaran untuk pemenuhan Layanan Rehabilitasi yang sesuai dengan SNI kepada lembaga-lembaga yang dijadikan target untuk SNI tahun 2023;
- 2) Bimbingan Teknis dan Monitoring Evaluasi kepada lembaga yang menjadi target untuk pemenuhan SNI 2023;

7. Sebagai rekomendasi perbaikan ke depan

- 1) Melakukan evaluasi dan pemenuhan sarana dan pra sarana yang ada di Klinik milik BNNP/Kab/Kota;
- 2) Memenuhi kelengkapan dokumen yang sesuai standar, dan melakukan peningkatan baik sarpras, penunjang layanan secara berkala;
- 3) Berkoordinasi dengan Bagian Umum terkait penambahan tenaga SDM untuk Klinik;
- 4) Mengajukan petugas untuk mengikuti pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kompetensi dalam layanan rehabilitasi;

5) Melakukan pengecekan dokumen dan pembaharuan dokumen secara berkala dengan menyesuaikan situasi yang ada.

8. Upaya yang Telah Dilakukan

Pembinaan secara berkelanjutan ke lembaga rehabilitasi yang telah pemenuhan di Tahun 2022 (Klinik BNNK Kotawaringin Barat dan BNNK Palangka Raya) sehingga dapat direkomendasikan untuk menjadi lembaga SNI 8807 Prioritas Nasional dengan pemenuhan 100%.



Asistensi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat

Indikator kinerja : Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi

1. Definisi Operasional

Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi Kalimantan Tengah adalah jumlah IBM yang aktif dan melakukan layanan.

2. Metode Pengukuran

Pengukuran dilakukan dengan penghitungan jumlah IBM yang aktif dan melakukan layanan.

3. Hasil Pengukuran

Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi Kalimantan Tengah adalah 4 unit dengan rincian realisasi sebagai berikut :

No	Fasilitas	Jumlah Pasien	Keterangan Fase IBM
1.	IBM P2 Barigas (2 unit)	13 orang	Tanggung
2.	IBM Barigas Berkah	8 orang	Tanggung
3.	IBM Pasir Panjang	8 orang	Prima
	TOTAL	29 orang	

4. Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir :

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2020	-	-	-
2021	3 lembaga	4 lembaga	133,33 %
2022	3 lembaga	4 lembaga	133,33 %

Pada tahun 2020, kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah memiliki indikator kinerja yang berbeda dengan tahun 2021 dan 2022. Perbedaan indikator ini mengakibatkan capaian kinerja 2020 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dan 2022. Untuk tahun 2021 capaian persentase 133,33% sama dengan capaian tahun 2022.

5. Permasalahan yang dihadapi

Belum adanya dukungan dalam bentuk anggaran dari Kelurahan untuk Unit IBM setempat terkait dukungan operasional bagi petugas agen pemulihan.

6. Faktor yang menunjang

Koordinasi dan sinergitas kepada instansi terkait guna pemberian dukungan baik secara moril dan operasional kepada Unit IBM yang ada di wilayah tersebut sehingga dapat berjalan dengan maksimal.

7. Sebagai rekomendasi perbaikan ke depan

Koordinasi kepada Camat maupun Lurah wilayah setempat untuk dapat menganggarkan anggaran terkait operasional bagi Petugas Agen Pemulihan atau Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang ada di wilayah tersebut.

8. Upaya yang Telah Dilakukan

Sosialisasi program rehabilitasi bagi pecandu dan atau penyalahguna narkoba sebagai solusi terbaik dalam usaha *demand reduction*.



Penandatanganan Mou Antara BNNP Kalteng dengan Pemda Kabupaten Gunung Mas Serta RSUD Kuala Kurun

7. Sasaran : Meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	PERSENTASE
10.	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Tengah	3,4	3,624	106 %

1. Definisi Operasional

Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi (IKM per tahun) adalah hasil dari jumlah total skor penilaian semester 1 dan 2 dibagi jumlah total responden.

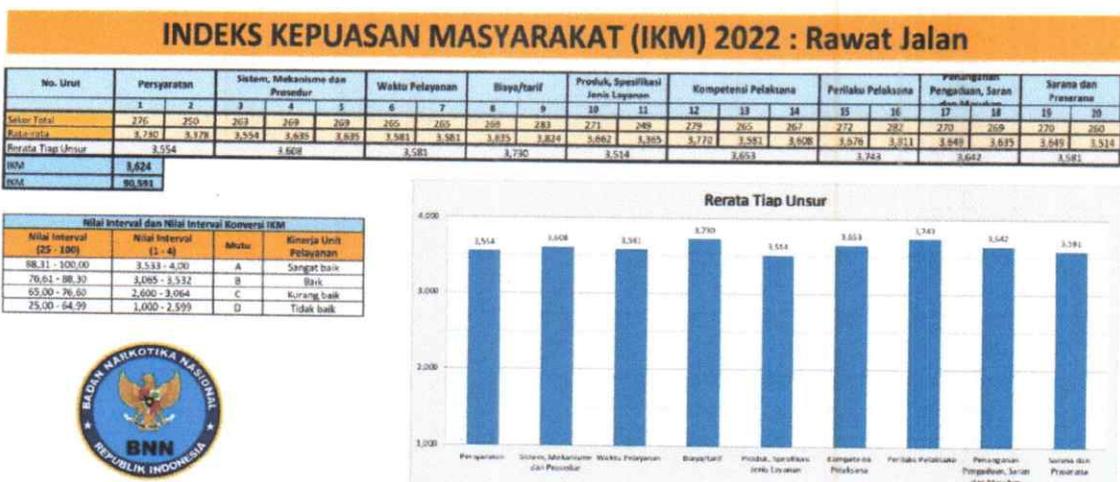
2. Metode Pengukuran

Pengukuran dilakukan oleh Deputi Bidang rehabilitasi sebanyak dua kali per tahun (per semester) sesuai amanag Permenpan No.14/2017.

3. Hasil Pengukuran

Indikator kinerja untuk indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran (BNNK Palangka Raya dan BNNK Kotawaringin Barat) dengan Target Nasional indeks sebesar 3,491 serta realisasi sebesar 3,624.

Adapun grafik dan tabel hasil indeks tersebut, yaitu :



4. Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir :

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2020	-	-	-
2021	3,2	3,43	107,18%
2022	3,4	3,624	106 %

Pada tahun 2020, kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Pemerintah memiliki indikator kinerja yang berbeda dengan tahun 2021 dan 2022. Perbedaan indikator ini mengakibatkan capaian kinerja 2020 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dan 2022. Untuk tahun 2021 capaian persentase 107,18% dari target sedangkan tahun 2022 target tercapai 106%. Terjadi peningkatan target pada tahun 2022 dari 3,2 menjadi 3,4. Capaian tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021.

5. Permasalahan yang dihadapi

Dalam hasil perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), aspek terendah ditunjukkan di Unsur Produk, Spesifikasi Jenis Layanan (dibuktikan dengan hasil perhitungan IKM Tahun 2022 oleh Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI). Dalam modul atau panduan Indeks Kepuasan Masyarakat, Unsur Produk, Spesifikasi Jenis Layanan yaitu terkait hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

6. Faktor yang menunjang

- 1) Sosialisasi internal kepada petugas layanan secara berkala terkait;
- 2) Review dan perbaharuan standar layanan sesuai dengan produk layanan yang telah dihasilkan;
- 3) Konsultasi dan koordinasi kepada lembaga yang berwenang dalam penilaian layanan publik, contohnya Ombudsman;
- 4) Inovasi terkait kemudahan klien dalam menjangkau layanan rehabilitasi di BNNP Kalteng dan Jajaran, misalnya penggunaan aplikasi online pada setiap layanan.

7. Sebagai rekomendasi perbaikan ke depan

- 1) Melakukan review dan perbaikan dalam standar pelayanan, sehingga layanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 2) Meningkatkan layanan, kapasitas petugas dan sarana pra sarana yang ada di Klinik Rehabilitasi BNNP Kalteng dan Jajaran.

8. Upaya yang Telah Dilakukan

Melakukan inovasi terkait kemudahan klien dalam menjangkau layanan rehabilitasi di BNNP Kalteng dan Jajaran dengan pendaftaran SKHPN Online.



Layanan Pojok Konseling Di Mini Mal Pelayanan Terpadu DPMPSTP Provinsi Kalimantan Tengah

8. Sasaran : Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya

Untuk mencapai sasaran diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
11.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	10 Berkas	23 Berkas	230%

1. Definisi Operasional

Jumlah berkas tindak pidana narkotika yang P-21 adalah berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk

dilakukan penuntutan.

2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran dengan mengakumulasikan jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkoba yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P-21 untuk dilakukan penuntutan dari unit pusat dan vertikal.

3. Hasil pengukuran

Dari target yang ditetapkan sebanyak **10** berkas dapat terealisasi sebanyak **23** berkas atau tercapai sebesar **230 %**, dengan penggunaan anggaran seminimal mungkin sehingga sisa anggaran masih cukup untuk pengungkapan kasus melebihi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkoba berjalan dengan lancar sehingga terjalin Kerjasama yang baik antar kedua belah pihak. Adapun rincian jumlah berkas perkara TP Narkoba yang P-21 dapat dilihat pada rincian berikut ini :

Satker BNNK/ Bidang	Target	Realisasi	Persentase (%)
1. BNNP Kalimantan Tengah	8	20	250
2. BNNK Palangka Raya	1	1	100
3. BNNK Kotawaringin Barat	1	2	200

4. Perbandingan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir

Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir:

Satker	2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
BNNP Kalimantan Tengah	10	16	8	39	8	20
BNNK Palangka Raya	1	4	1	4	1	1
BNNK Kotawaringin Barat	1	3	1	2	1	2
Total	12	23	10	45	10	23

Selama tiga tahun, kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkoba memiliki indikator kinerja yang sama yakni Jumlah berkas perkara tindak pidana

narkotika yang P-21. Perbandingan capaian kinerja selama tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2020	12 berkas	23 berkas	191,66%
2021	10 berkas	45 berkas	450%
2022	10 berkas	23 berkas	230%

Apabila dibandingkan selama tiga tahun berturut-turut, tahun 2020-2022 maka persentase capaian terbesar adalah pada taun 2021 yakni terdapat 45 berkas perkara yang P-21..

5. Permasalahan yang dihadapi

- 1) Tidak adanya kendaraan operasional.
- 2) Belum memadai peralatan IT dalam mengungkap jaringan tindak pidana narkotika (celebrite dan df).

6. Faktor yang menunjang

- 1) Informasi terkait jaringan narkotika yang akurat.
- 2) Koordinasi yang baik terjalin antara BNNP Kalteng dan stakeholder.

7. Sebagai Rekomendasi Perbaikan ke depan

Melakukan kolaborasi dengan BIN, Polda, BNNP Kalimantan Selatan, bea cukai, kejaksaan dan Kemenkumham.

8. Upaya yang Telah Dilakukan

Kolaborasi dengan tim IT Direktorat Intelijen BNN RI.



Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti

9. Sasaran : Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika

Untuk mencapai sasaran diatas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	PERSENTASE
12.	Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan Kesehatan tahanan	100	100	100%
13.	Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non- Narkotika	100	100	100%

Indikator Kinerja : Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan Kesehatan tahanan

1. Definisi Operasional

Tingkat keamanan, ketertiban dan Kesehatan tahanan adalah kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban

dan Kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan, meliputi:

a. Adanya tahanan yang kabur.

b. Perkelahian antara tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan

c. Hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas.

2. Metode Pengukuran

Pengukuran dilakukan dengan mendata kejadian – kejadian seperti diatas.

Penghitungan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Seluruh Tahanan} - (a + b + c)}{\text{Jumlah seluruh Tahanan}} \times 100\%$$

3. Hasil pengukuran

NO	Kasus	JumlahTahanan	Kesehatan	Nilai
1	Tahanan Masuk	24 tahanan	Sehat	100
2	Tahanan Keluar	23 tahanan 1 tahanan	Sehat Meninggal dunia karena sakit di RS Bhayangkara	100
	Nilai	100	100	100

4. Perbandingan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir

Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir:

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2020	100	100	100%
2021	100	100	100%
2022	100	100	100%

Selama tahun 2020-2022 nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan selalu mencapai target yakni 100.

5. Permasalahan yang dihadapi

Kurangnya petugas penjaga tahanan dan penjagaan tahanan dibantu oleh penyidik BNN.

6. Faktor yang menunjang

Kesigapan petugas kesehatan dan petugas jaga tahanan sehingga tidak ada tahanan yang meninggal dunia di Rutan BNNP Kalteng karena kelalaian petugas atau melarikan diri dari sel Rutan BNNP Kalteng.

7. Sebagai Rekomendasi Perbaikan ke depan

Perlunya ditambah petugas penjaga tahanan di BNNP Kalteng sehingga lebih mudah melakukan kontrol nilai tingkat keamanan.

8. Upaya yang Telah Dilakukan

Melakukan pengecekan kesehatan tahanan secara berkala.



Pemeriksaan Kesehatan dan Swab Antigen Tersangka Baru

Indikator Kinerja : Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika

1. Definisi Operasional

Tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika adalah kondisi keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara wajar pada barang bukti narkotika dan non narkotika.

2. Metode Pengukuran

Metode pengukuran dengan membandingkan data kondisi barang bukti narkotika dan non narkotika pada saat diterima dari penyidik dengan waktu dikeluarkan untuk proses pemusnahan atau diserahkan terimakan untuk tahap penuntutan.

Satuan pengukuran per – BA penitipan dan BA pengeluaran. Jika jumlah dan jenis barang bukti yang tercantum sama dalam BA penitipan barang bukti dan BA pengeluaran, maka di peroleh $a = 1$. Jika terdapat perbedaan dalam BA penitipan dan BA pengeluaran, maka $a = 0$.

Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh data BA penitipan dan BA pengeluaran baik narkotika maupun non narkotika setiap LKN semuanya sama, maka diasumsikan $a=1$, sehingga capaian indikator kinerjanya 100%.

3. Hasil pengukuran

Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika sebesar 100 dengan rincian capaian sebagai berikut :

NO	Barang bukti	Barang bukti masuk	Barang bukti dimusnahkan & Untuk keperluan lain (Sesuai UU 35 Tahun 2009)
1	Shabu	2.059,16 gr	2.059,16 gram
2	Ekstasi	10 Butir	10 Butir
3.	Tembakau Sintetis	3,87 gram	3,87 gram
	Nilai	100	100

4. Perbandingan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir

Berikut data barang bukti narkotika selama beberapa tahun terakhir:

TAHUN	JUMLAH BB				
	SHABU	CARISOPRODOL	EKSTASI	GANJA	TEMLAKAU SINTETIS
2020	5510.55 GRAM	400.000 BUTIR	-	-	-
2021	3.855,59 GRAM		-	1.020,6 gram	5,4 GRAM
2022	2.074,44 GRAM	-	10 BUTIR	1.020,6 Gram	3,87 GRAM

Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir:

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2020	100	100	100%
2021	100	100	100%
2022	100	100	100%

Selama tahun 2020-2022 nilai Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika selalu mencapai target yakni 100.

5. Permasalahan yang dihadapi

Belum tersedianya ruang / tempat penyimpanan barang bukti yang memadai di BNNP Kalteng.

6. Faktor yang menunjang

Tidak ada barang bukti yang hilang dan semua bb narkotika karena sudah dimusnahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. Sebagai Rekomendasi Perbaikan ke depan

Agar dibuat ruang / tempat penyimpanan barang bukti dan perlu tambahan personil untuk mengisi posisi yang ada di seksi Wastahti.

8. Upaya yang Telah Dilakukan

Pengadaan CCTV di ruang barang bukti.



Press Release dan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dan Pil Ekstasi Hasil Ungkap Perkara BNNP Kalimantan Tengah Bulan Mei dan Juni 2022

10. Sasaran : Meningkatkan proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase
14.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Tengah	88	87,63	99,67
15.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	2	0	0.00

Indikator Kinerja : Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Definisi Operasional

Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.

2. Metode Pengukuran

Nilai Kinerja Anggaran diambil dari aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Nilai tersebut ditentukan oleh beberapa aspek dengan bobot sebagai berikut :

- a. Capaian rincian output (43,5%)
- b. Nilai efisiensi (28,6%)
- c. Konsistensi penyerapan anggaran (18,2%)
- d. Penyerapan anggaran (9,7%)

3. Hasil Pengukuran



Nilai Kinerja Anggaran BNNP Kalimantan Tengah adalah 87,63 yang berarti tidak mencapai target tahun 2022 sebesar 88. Perhitungan nilai kinerja anggaran BNNP Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

Indikator	Bobot	Capaian Indikator	Capaian Tertimbang
Capaian Rincian Output	43.50%	100.00	43.50
Nilai Efisiensi	28.60%	57.49	16.44
Konsistensi Penyerapan Anggaran	18.20%	99.37	18.08
Penyerapan Anggaran	9.70%	98.96	9.59
CAPAIAN SMART DJA			87.63%

4. Perbandingan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir
Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir:

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2020	88	99,23	112,76%
2021	99.5	86.49	86,92%
2022	88	87,63	99,57%

Bobot terbesar pada penilaian Nilai kinerja anggaran bergantung pada pada pencapaian output dan efisiensi, pada tahun 2020-2022 semua output tercapai namun perbedaan nilai efisiensi mengakibatkan Nilai kinerja anggaran pada tahun 2021 dan 2022 tidak mencapai target.

5. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan dalam pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian indikator untuk nilai efisiensi sangat rendah, hanya berkisar antara 2,99% sementara bobotnya mencapai 28,6%. Penyerapan anggaran tidak lagi memiliki bobot setinggi tahun-tahun sebelumnya sehingga walaupun penyerapan anggaran lebih dari 95% namun Nilai Kinerja Anggaran rendah.

6. Faktor yang menunjang

Pemahaman pelaksana kegiatan tentang kinerja anggaran bahwa pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan timeline dan pencapaian output sejalan dengan penyerapan anggaran.

7. Rekomendasi perbaikan ke depan

- 1) Capaian output harus sejalan dengan penyerapan anggaran yang dilakukan.
- 2) Sosialisasi kepada bidang-bidang dan satker bahwa pencapaian output dan efisiensi penggunaan anggaran yang akan mampu meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran.

8. Upaya yang Telah Dilakukan

Update capaian output dan progress oleh aplikator aplikasi SMART Kemenkeu tepat waktu

Indikator Kinerja : Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target

1. Definisi Operasional

Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.

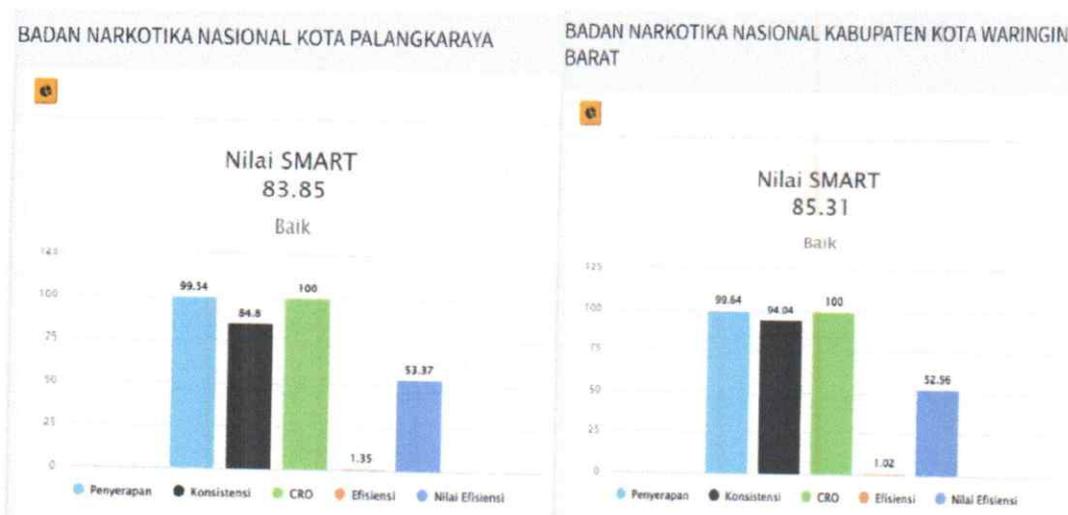
2. Metode Pengukuran

Nilai Kinerja Anggaran diambil dari aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Nilai tersebut ditentukan oleh beberapa aspek dengan bobot sebagai berikut :

- Capaian rincian output (43,5%)
- Nilai efisiensi (28,6%)
- Konsistensi penyerapan anggaran (18,2%)
- Penyerapan anggaran (9,7%)

3. Hasil Pengukuran

Target indikator kinerja BNNP Kalimantan Tengah berikutnya adalah Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebanyak 2 BNNK.



Setiap BNN Kabupaten/Kota memiliki target Nilai Kinerja Anggaran sebesar 87, namun seperti yang terlihat pada tabel berikut tidak ada BNNK yang berhasil mencapai target.

SATKER	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase
BNNK Palangka Raya	87	83,85	96,37%
BNNK Kotawaringin Barat	87	85,31	98,05%

4. Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir:

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2020	-	-	-
2021	2 Kabupaten/ Kota	0 Kabupaten/ Kota	0%
2022	2 Kabupaten/ Kota	0 Kabupaten/ Kota	0%

Pada tahun 2020, Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran belum menjadi indikator kinerja sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022. Selama 2021 dan 2022, BNNK belum ada yang nilai kinerja anggarannya mencapai target.

5. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan dalam pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran dengan BNNP Kalimantan Tengah sama yakni capaian indikator untuk nilai efisiensi sangat rendah sementara bobotnya mencapai 28,6%. Penyerapan anggaran tidak lagi memiliki bobot setinggi tahun-tahun sebelumnya sehingga walaupun penyerapan anggaran lebih dari 95% namun Nilai Kinerja Anggaran rendah.

6. Faktor yang menunjang

- 1) Pemahaman pelaksana kegiatan di BNNK tentang kinerja anggaran bahwa pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan timeline dan pencapaian output sejalan dengan penyerapan anggaran.
- 2) Update capaian output dan progress oleh aplikator aplikasi SMART Kemenkeu.

7. Rekomendasi perbaikan ke depan

- 1) Capaian output harus sejalan dengan penyerapan anggaran yang dilakukan.

- 2) Sosialisasi kepada bidang-bidang dan satker bahwa pencapaian output dan efisiensi penggunaan anggaran yang akan mampu meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran.

8. Upaya yang Telah Dilakukan

Pemantauan update capaian output dan progress aplikasi SMART Kemenkeu oleh Pembina Fungsi di BNNP.



Pemberian penghargaan dan peringatan atas capaian kinerja tahun anggaran 2021.

11. Sasaran : Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase
16.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Tengah	95	98,17	103,33
17.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	2	0	0.00

Indikator Kinerja : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Tengah

1. Definisi Operasional

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga.

2. Metode Pengukuran

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Akuntansi Negara (OMSPAN) Kementerian Keuangan. IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

3. Hasil Pengukuran



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output				
1	043	066	682668	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	84.86	100.00	100.00	100.00	96.87	100.00	100.00	98.17	100%	98.17	
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25					
					Nilai Akhir	10.00	8.49	20.00	10.00	10.00	9.69	5.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.43		99.37					100.00				

Disclaimer:

Sesuai Peraturan Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Nilai IKPA BNNP Kalimantan Tengah 98,17 sehingga mencapai targetnya yang 95.

4. Berikut target dan realisasi capaian kinerja selama beberapa tahun terakhir:

T.A	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
2020	-	-	-
2021	94	98.26	104.53
2022	95	98.17	103,33

Pada tahun 2020, nilai IKPA belum menjadi indikator kinerja sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022. Selama 2021 dan 2022 target nilai IKPA tercapai namun terjadi penurunan capaian sebesar 1,2%.

5. Permasalahan yang dihadapi

Penyebab Nilai IKPA BNNP Kalteng tidak maksimal adalah beberapa indikator tidak mencapai nilai maksimal, yaitu :

1) Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Uang Persediaan (UP) minimal direvolving satu bulan sekali atau dapat juga dilakukan berkali-kali dan tidak boleh terlambat, sedangkan pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dipertanggungjawabkan satu bulan sesuai dengan surat pernyataan dan tidak ada sisa yang dikembalikan/disetor.

2) Deviasi Halaman III DIPA

Tingkat perbedaan antara perencanaan penarikan dana terhadap realisasi setiap bulannya terlalu besar. Besar kecilnya nilai deviasi halaman III DIPA menggambarkan tingkat keakuratan satker atau K/L dalam merencanakan pelaksanaan kegiatannya. Rendahnya nilai deviasi halaman III DIPA menunjukkan bahwa rencana kegiatan satker atau K/L terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, apabila nilai deviasi halaman III DIPA tinggi menunjukkan tidak terlaksananya kegiatan satker atau K/L sebagaimana rencana waktu yang telah ditetapkan.

6. Faktor yang menunjang

1) Pemahaman PPK dan pelaksana keuangan terhadap indikator yang mempengaruhi nilai IKPA.

- 2) Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja keuangan satker binaan sehingga dapat diantisipasi segera jika nilai indikator kinerja berpotensi tidak maksimal.
7. Rekomendasi perbaikan ke depan
- 1) PPK dan pelaksana bidang melaksanakan pembelanjaan sesuai rencana penarikan dan mengawasi agar penyerapan anggaran memperhatikan aturan yang berlaku secara efisien dan efektif.
 - 2) Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja keuangan satker binaan sehingga dapat diantisipasi segera jika nilai indikator kinerja berpotensi tidak maksimal.
8. Upaya yang Telah Dilakukan
- a. Meningkatkan sinergi antar pejabat pengelola perbendaharaan, sehingga ada kesamaan pandangan dan mempunyai keinginan untuk meningkatkan nilai IKPA.
 - b. Menjalankan fungsi pengawasan sebaik mungkin baik yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran.
 - c. Penandatanganan SPM harus lebih cermat terhadap perubahan nama dalam rekening dan dirubah juga nama di Bank Pembayar dan di KPPN.
 - d. Melakukan revisi pada RPD sesuai jadwal yang ditentukan dengan memperhatikan update timeline kegiatan yang telah dan belum dilaksanakan.
 - e. Bendahara melakukan penagihan pertanggungjawab keuangan sehingga pengelolaan TUP lancar,

Indikator Kinerja : Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target

1. Definisi Operasional

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga. Target nilai IKPA untuk BNNK adalah 95.

2. Metode Pengukuran

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Akuntansi Negara (OMSPAN) Kementerian Keuangan. IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

4. Hasil Pengukuran



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALANGKARAYA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan: DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	Nilai Total		Konversi Bobot
1	043	066	145161	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALANGKARAYA	Nilai	100.00	75.51	100.00	42.86	33.33	96.95	100.00	100.00	84.86	100%	84.86
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.55	20.00	4.29	3.33	9.70	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	87.76		74.63					100.00			

Disclaimer:

Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan: DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	Nilai Total		Konversi Bobot
1	102	066	419256	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	Nilai	100.00	64.63	96.97	0.00	0.00	99.58	100.00	100.00	75.82	80%	94.77
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	6.46	19.39	0.00	0.00	9.96	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	82.32		96.85					100.00			

Disclaimer:

Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

NO	SATKER	TARGET	CAPAIAN
1	BNN Kota Palangka Raya	95	84,86
2	BNN Kab. Kotawaringin Barat	95	94,77

Adapun Nilai IKPA BNNK Palangka Raya adalah 84,86 dan nilai IKPA BNNK Kotawaringin Barat adalah 94,77. Nilai IKPA kedua BNNK ini di bawah 95 sehingga tidak ada BNNK di wilayah provinsi Kalimantan tengah yang nilai IKPAnya mencapai target.

4. Permasalahan yang dihadapi

- 1) Penyelesaian tagihan dan data kontrak tidak tepat waktu.
- 2) Tingkat perbedaan antara perencanaan penarikan dana terhadap realisasi setiap bulannya terlalu besar. Besar kecilnya nilai deviasi halaman III DIPA menggambarkan tingkat keakuratan satker atau K/L dalam merencanakan pelaksanaan kegiatannya. Rendahnya nilai deviasi halaman III DIPA menunjukkan bahwa rencana kegiatan satker atau K/L terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, apabila nilai deviasi halaman III DIPA tinggi menunjukkan tidak terlaksananya kegiatan satker atau K/L sebagaimana rencana waktu yang telah ditetapkan.

5. Faktor yang menunjang

- 1) Pemahaman PPK dan pelaksana keuangan terhadap indikator yang mempengaruhi nilai IKPA.
- 2) Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja keuangan setiap bidang sehingga dapat diantisipasi segera jika nilai indikator kinerja berpotensi tidak maksimal.

6. Rekomendasi perbaikan ke depan

- 1) PPK dan pelaksana bidang melaksanakan pembelanjaan sesuai rencana penarikan dan mengawasi agar penyerapan anggaran memperhatikan aturan yang berlaku secara efisien dan efektif.

- 2) Meningkatkan sinergi antar pejabat pengelola perbendaharaan, sehingga ada kesamaan pandangan dan mempunyai keinginan untuk meningkatkan nilai IKPA satuan kerja yang bersangkutan.
- 3) Menjalankan fungsi pengawasan sebaik mungkin baik yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran.

8. Upaya yang Telah Dilakukan

- a. Melakukan pembinaan kepada satker BNNK terkait IKPA dan NKA;
- b. Menjalankan fungsi pengawasan sebaik mungkin baik yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran.

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran belanja BNN Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 adalah sebesar Rp.7.608.013.657,- atau 99,05% dari total anggaran yang disediakan yaitu sebesar Rp. Rp.7.681.314.000,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa	Persentase
1	Belanja Pegawai	Rp.3.463.814.000,-	Rp.3.458.727.333,-	Rp.5.078.667,-	99,85
2	Belanja Barang	Rp.4.203.527.000,-	Rp.4.135.450.324,-	Rp.68.076.676,-	98,38
3	Belanja Modal	Rp. 14.000.000,-	Rp. 13.836.000,-	Rp. 164.000,-	98,83
	Jumlah	Rp.7.681.314.000,-	Rp.7.608.013.657,-	Rp.73.327.343,-	99,05

Jika dibandingkan dengan tahun yang lalu maka ada kenaikan signifikan sebesar 77%. Kenaikan tersebut dikarenakan mulai Tahun 2022 BNNP Kalimantan Tengah mengelola sendiri uang makan dan gaji semua pegawai di BNNP Kalteng dan jajaran.

No	Jenis Belanja	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/ Turun
1	Belanja Pegawai	-	Rp.3.463.814.000,-	-
2	Belanja Barang	Rp.4.307.554.000,-	Rp.4.203.527.000,-	-2%
3	Belanja Modal	Rp. 32.000.000,-	Rp. 14.000.000,-	-56%
	Jumlah	Rp.4.339.554.000,-	Rp.7.681.314.000,-	77%

Untuk realisasi BNNP Kalimantan Tengah dan jajaran TA.2022 adalah sebagai berikut :

No	Satker	Pagu	Realisasi	Persentase
1	BNNP Kalimantan Tengah	Rp.7.681.314.000,-	Rp.7.608.013.657,-	99,05
2	BNNK Palangka Raya	Rp.1.831.745.000,-	Rp.1.823.309.851,-	99,54
3	BNNK Kotawaringin Barat	Rp.1.583.604.000,-	Rp.1.577.834.739,-	99,64
		Rp.11.096.663.000,-	Rp.11.009.158.247,-	99,21

BAB IV
PENUTUP

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pencapaian Indikator Kinerja BNN Prov. Kalimantan Tengah TA 2022 rata – rata sebesar 103,33% , dengan rincian sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
1	2 Kabupaten/ Kota	2 Kabupaten/ Kota	100
2	2 Kabupaten/ Kota	2 Kabupaten/ Kota	100
3	2 Kabupaten/Kota	2 Kabupaten/Kota	100
4	1 Kawasan	1 Kawasan	100
5	2,85	2,97	104,21
6	15 Orang	15 Orang	100
7	10 Orang	10 Orang	100
8	2 Lembaga	2 Lembaga	100
9	3 Unit	3 Unit	100
10	3,4	3,624	106
11	10 Berkas	23 Berkas	230
12	100	100	100
13	100	100	100
14	88	87.63	99,57
15	2 BNN Kabupaten/ Kota	0 BNN Kabupaten/ Kota	0
16	95	98,17	103,33
17	2 BNN Kabupaten/ Kota	0 BNN Kabupaten/ Kota	0

Rentang Capaian	Kategori
Capaian \geq 100%	Memuaskan
$85\% \leq$ Capaian $<$ 100%	Sangat Baik
$70\% \leq$ Capaian $<$ 85%	Baik
$55\% \leq$ Capaian $<$ 70%	Cukup
$55\% \leq$ Capaian	Kurang

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran belanja BNN Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 adalah sebesar Rp.7.608.013.657,- atau 99,05% dari total anggaran yang disediakan yaitu sebesar Rp. Rp.7.681.314.000,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa	Persentase
1	Belanja Pegawai	Rp.3.463.814.000,-	Rp.3.458.727.333,-	Rp.3.458.727.333,-	99,85
2	Belanja Barang	Rp.4.203.527.000,-	Rp.4.135.450.324,-	Rp.4.135.450.324,-	98,38
3	Belanja Modal	Rp. 14.000.000,-	Rp. 13.836.000,-	Rp. 13.836.000,-	98.83
	Jumlah	Rp.7.681.314.000,-	Rp.7.608.013.657,-	Rp.7.608.013.657,-	99.05

C. Rekomendasi/Rencana Aksi Kedepan

1. Lebih memaksimalkan peran media cetak, media online/sosial, media luar ruang sebagai sarana penyebaran informasi P4GN
2. Perlu meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta untuk mendukung program P4GN
3. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat, upaya yang dilakukan dengan menambah target wilayah pemberdayaan masyarakat yang menjadi sasaran kinerja sesuai dengan prioritas, program/kegiatan, hasil

dan anggaran yang tersedia. Kemudian memberikan apresiasi dan pembinaan keberlanjutan kepada penggiat anti narkoba.

4. Penetapan target rehabilitasi agar lebih realistis disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
5. Optimalisasi pemanfaatan IT yang ada dan mengupgrate peralatan intelijen sesuai dengan perkembangan teknologi dan meningkatkan kerjasama dengan para penegak hukum termasuk sharing informasi.
6. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dari tingkat perencanaan hingga pelaporan dan melakukan perbaikan sesegera mungkin.